

Analisis Kebijakan Retrospektif Pengelolaan Dana BOS Di SMA Negeri 1 Badau Kalimantan Barat

Nanda Muethia¹⁾, Hendro Wardhono²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo
Email: nandamuethia23@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Dalam Pengelolaan Dana BOS harus berpedoman dengan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana BOS yang dilakukan di SMAN 1 Badau kurun waktu 2018-2021 dengan pendekatan retrospektif. Hasil penelitian pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dari pemeliharaan sarana dan prasaranan yang seharusnya didanai oleh BOS belum memenuhi standar layak pakai serta tidak transparan dalam perencanaan pengelolaan dana BOS. Ada beberapa faktor penghambatan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau seperti: (i) dana BOS yang diberikan belum bisa mencukupi semua kebutuhan sekolah, (ii) kurangnya SDM dalam pengelolaan dana BOS, (iii) letak geografis sekolah yang jauh dari perkotaan, dan (iv) penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS adalah komunikasi. Ada beberapa rekomendasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau yaitu lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana BOS.

Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Analisis Kebijakan Retrospektif.

Abstract

School Operational Assistance is one of the government programs which is the implementation of Law number 20 of 2003. In managing school operational assistance funds, it must be guided by the technical manual of the use of school operational assistance funds issued by the minister of education and culture. This study aims to analyze the policy for managing school operational assistance funds at SMAN 1 Badau for the period 2018-2021 with a retrospective approach. The results of the research on the management of school operational assistance funds at SMAN 1 Badau are still less effective. This is evidenced by the maintenance of facilities and infrastructure that should be funded by school operational assistance funds that do not meet appropriate standards for use and are not transparent in planning for the management of school operational assistance funds. There are several inhibiting factors in managing school operational assistance funds at SMAN 1 Badau, such as: (i) school operational assistance funds provided have not been able to meet all school needs, (ii) lack of human resources in managing school operational assistance funds, (iii) geographical location of school far from urban areas, and (iv) distribution of school operational assistance funds that do not match school needs. A supporting factor in management of school operational assistance funds is communication. There are several policy recommendations for managing school school operational assistance funds at SMAN 1 Badau, namely being more transparent and accountable in managing school operational assistance funds.

Keywords: School Operational Assistance (BOS); Retrospective Policy Analysis

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di tanah air. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan pendidikan seseorang memiliki kompetensi dan kualitas untuk menjawab tantangan demi tantangan dalam permasalahan kehidupan global. Prof. Dr. Imam Barnadib mengatakan Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Mahalnya pendidikan menjadi salah satu pemicu dalam rendahnya keterlibatan masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu membiayai sekolah, terutama masyarakat miskin atau ekonomi rendah, sehingga partisipasi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang baik harus dilakukan dengan memberikan pendanaan pendidikan bagi masyarakat, salah satunya adalah dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS). Program dana BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi bahwa “pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya”.

Bantuan Operasional Sekolah ini di Komandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana penyaluran Dana BOS wajib berpegangan pada Buku Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagaimana yang tertera dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 yang mana dilampirkan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sangat penting dikaitkan dengan peningkatan kualitas sekolah terutama di bidang proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, manajemen sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Selain itu, minimnya fasilitas serta kurangnya perhatian sekolah terhadap kebutuhan siswa dan kurangnya transparansi dari komite sekolah yang tidak melibatkan orang tua peserta didik dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu pemicu terhambatnya pembangunan dan perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif analisis kebijakan restropektif? Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dapat teridentifikasi atas implementasi kebijakan dana BOS di

SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan merujuk pada analisis kebijakan restopektif yang berorientasi pada masalah? Rekomendasi kebijakan seperti apakah yang dapat dirumuskan agar pelaksanaan kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih baik ke depan?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya (William N. Dunn, 2000).

Berdasarkan definisi diatas, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan pemaduan berbagai informasi termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras. Kegiatan utama analisis kebijakan adalah pengeumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang logis dari informasi tersebut. Salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan adalah hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengelolaan lebih lanjut dari hasil penelitian yang didapatkan sehingga siap

digunakan dalam pengambilan keputusan dari kebijakan publik. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan berhati-hati yang melibatkan penelitian terhadap isu-isu atau masalah publik.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif

Menurut William N. Dunn (2000) Analisis Kebijakan Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan atau setelah suatu kebijakan diimplementasikan, demikian merupakan hasil dan transformasi sesudah kebijakan diambil disebut juga dengan model evaluatif. Terdapat 3 gaya analisis retrospektif berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh sekelompok analis, yaitu :

1) Analisis yang Berorientasi

Disiplin, lebih berfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan dan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan.

2) Analisis yang Berorientasi

Masalah, menitik beratkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan dan bersifat terapan, namun masih bersifat umum.

3) Analisis yang Berorientasi

Aplikasi, menjelaskan hubungan kausalitas dan lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi yang

dihasilkn dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif baru dari kebijakan, serta mengarah pada pemecahan masalah yang praktis.

3. Program Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menyatakan Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai setiap kebutuhan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional secara teratur dan berkelanjutan. Maka sudah seharusnya pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan dana BOS dilakukan sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menurut Nanang Fattah dalam Zulfiati (2014), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan belajar mengajar berupa pembelian alat-alat

pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

4. Tujuan Dana BOS

Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan ditinjau dari air. Tujuan lain dari program dana BOS ialah :

- a) Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
- b) Mengurangi angka putus sekolah;
- c) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- d) Mewujudkan keberpihakan pemerintah pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang tidak mampu dengan dibebaskan dari tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e) Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui program dana

Bantuan Operasional Sekolah dapat menjadikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu ditanah air

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi (peristiwa) dalam wilayah tertentu. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, gambar dan dokumen dikumpulkan untuk mengkaji masalah bagaimana efektivitas dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka haruslah sesuai dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber (orang-orang) dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan melukiskan fenomena atau populasi tertentu yang di peroleh dari subjek yang berupa individu, organisasi atau perspektif lainnya, kemudian menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang di amati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada (Moleong, 2006:11).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan dimana adanya ketertarikan data satu dengan lainnya sehingga saling melengkapi. Adapun

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang berupa pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan. Pada saat mengajukan pertanyaan penulis dapat bertanya serta berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak memungkinkan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi 2011:105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar kompeten di bidangnya, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara pada Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Tim Manajemen BOS (Komite) dan Bendahara, agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen. Wawancara akan dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk mempermudah peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah untuk memasukannya ke laporan hasil penelitian Analisis Kebijakan Restropektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

2) Observasi

Menurut Sanusi (2011:77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan abyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis akan mempersiapkan catatan atau alat observasi terlebih dahulu, baik hanya sekedar menfapatkan daftar cek ataupun sekedar penilaian.

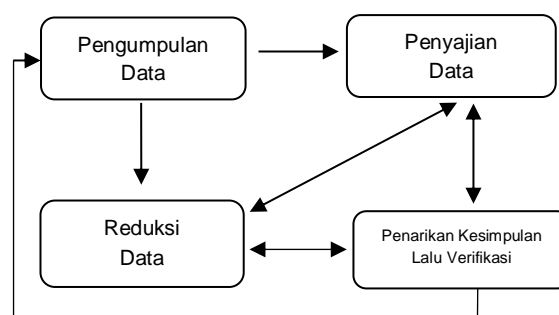
3) Dokumentasi

Menurut Bungin yang dikutip oleh imam Gunawan mengatakan, teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi sendiri dapat berupa catatan seperti tulisan, gambar, recording atau karya seseorang.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengimplementasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam memperkuat informasi dalam penelitian antara lain dokumen profil sekolah, visi misi sekolah, fasilitas, jumlah guru dan RKAS (Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah).

3. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang penulis pilih ialah analisis data model Milles dan Huberman, yang mana meliputi :



Gambar 1. Analisis Data Model Interatif Milles dan Huberman (1992)

1) Pengumpulan Data

Peneliti membuat catatan data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

2) Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari dan dipahami maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data. Pada langkah ini, proses berkaitan erat dengan penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan.

3) Penyajian Data

Penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan

secara panjang lebar temuan pada penelitian.

4) Penarikan Kesimpulan Lalu Verifikasi

Analisis ini menggunakan analisis model interaktif yang artinya analisis dilakukan dalam bentuk interaktif dari tiga komponen utama tersebut. Data yang dikumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang palingan tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan terfokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau

Tahap Implementasi merupakan sebuah proses penting yang paling menentukan apakah Bantuan Operasional Sekolah tepat sasaran atau tidaknya. Implementasi Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau dari tahun 2018-2021 berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS. Berikut merupakan jalannya implementasi kebijakan pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Badau yang berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS.

a) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengalokasian dan BOS yang diterima oleh pihak sekolah menurut Bapak Yosafat Arif Dharmawan, S.Pd selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri

1 Badau merujuk pada Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan BOS yang diberikan oleh Pemerintah. Pemberian dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Besar nominal yang setiap tahunnya didapatkan para siswa ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Anggaran SMA Negeri 1 Badau pada tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Siswa	Dana BOS (Rp)	Total (Rp)
2018	230	1.400.000	322.000.000
2019	235	1.500.000	352.500.000
2020	252	1.500.000	378.000.000
2021	255	1.600.000	408.000.000

(Sumber : T.U SMAN 1 Badau, 2021)

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa besaran nominal yang diterima siswa pada tahun 2018 sebesar Rp 322.000.000. Pada tahun 2019 besaran nominal mengalami peningkatan baik dana yang di salurkan pemerintah maupun jumlah siswa sehingga yang diterima sebesar Rp 352.500.000. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah siswa namun dana yang disalurkan pemerintah tetap sama dengan tahun 2019 yang mana dana yang didapatkan sebesar Rp 378.000.000 dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam jumlah siswa maupun dana yang di salurkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 408.000.000. Penyaluran dana BOS yang berasal dari pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan

namun pada tahun 2020 tidak terjadi peningkatan diakibatkan oleh Pandemi Covid 19.

Meskipun dana BOS yang diberikan telah ditetapkan jumlah dan mekanismenya, namun terkadang masih terjadinya keterlambatan dana yang menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola bantuan tersebut. Berikut Merupakan komponen-komponan pengalokasian dana BOS yang ada di SMA Negeri 1 Badau.

Tabel 2. Penggunaan Dana BOS secara keseluruhan

No	Penggunaan Dana BOS
1.	Pengadaan alat tulis sekolah
2.	Pengadaan buku pelajaran
3.	Pemeliharaan sarana dan prasarana
4.	Langganan daya dan jasa
5.	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran
6.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa
7.	Kegiatan penerimaan siswa baru
8.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

(Sumber: Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah, 2021)

Dari tabel diatas, pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sudah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, yang mana dana BOS memang di alokasikan untuk kebutuhan Operasional non Personalia sekolah.

Namun hal ini berbeda dari pernyataan para siswa yang merasakan langsung sarana dan prasaranan yang ada di SMA Negeri 1 Badau. ada beberapa sarana dan prasaranan yang seharusnya di danai oleh BOS malah dibebankan kepada siswa. Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa dana BOS diperuntukan sebagai pembiayaan

kebutuhan Operasional non personalia sekolah.

Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana ialah agar barang tidak mudah rusak hilang atau kadaluarsa. Di SMA Negeri 1 Badau masih cukup banyak sarana dan prasarana yang kurang perawatan atau kurang dijaga dengan baik, salah satunya ialah kamar mandi siswa, yang mana tidak diperbaikinya kunci pintu pada kamar mandi, sehingga kamar mandi siswa dan siswi sama-sama tidak memiliki kunci. menurut Nanang Fattah dalam Zulfiati (2014), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Dalam hal ini sarana dan prasarana sekolah masuk pada biaya langsung yang seharusnya lebih diperhatikan. Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan belajar mengajar berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru, dan lain sebagainya. Ketidak tepat sasaran dana BOS sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan prestasi peserta didik.

Perpustakaan juga merupakan sarana dan prasarana yang harus menjadi perhatian pemeliharaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau. sejak tahun 2018-2021 Perpustakaan tidak di kelola dengan baik, buku yang sedikit dan ada yang sudah tidak layak baca serta penjaga perpustakaan yang tidak ada menjadikan perpustakaan hal yang tidak menarik dikalangan peserta. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan

dana BOS di SMA Negeri 1 Badau kurang efektif dan efisien.

b) Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Tahap pertama dalam pengambilan dana BOS ialah menunggu rekomendasi atau pemanggilan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi sehingga Bendahara dan Kepala Sekolah bisa langsung pergi ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan membawa beberapa berkas yang menjadi persyaratan pengambilan dana BOS, seperti data seluruh informasi dan jumlah peserta didik. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin tingkat akurasi dan kelengkapan setiap data individu peserta didik, pendidik dan kependidikan.

Hal ini tentu akan memakan waktu yang lama, karena pihak sekolah masih menggunakan cara manual yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pergi ke Provinsi yang memakan waktu dua hari dalam perjalanan.

Di dunia yang sudah modern ini, semua hal sudah bisa di akses menggunakan internet tak terkecuali dengan mekanisme penyaluran dana BOS ke setiap sekolah. Adanya aplikasi Dapodik mempermudah setiap sekolah dalam memproses penyaluran dana BOS. Sekolah hanya mengirimkan data informasi seluruh peserta didik ke aplikasi Dapodikmen lalu diverifikasi kembali oleh Tim Manajemen BOS, hal ini untuk memastikan jumlah peserta didik yang tercantum sesuai atau tidaknya dengan jumlah yang ada di sekolah. Selanjutnya Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan melakukan pengambilan data pada Dapodik untuk membuat usulan alokasi dana BOS tiap Provinsi yang akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Penghitungan alokasi dana BOS berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di Dapodikmen, setelah itu barulah Kementerian Keuangan menetapkan besaran alokasi BOS tiap Provinsi.

Penyaluran dana BOS ke sekolah melalui empat tahap dalam satu tahun. Tahap penyaluran dan pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau ialah sebagai berikut :

Tabel 3. Penyaluran dan Pencairan dana BOS

No.	Tri Bulan	Priode
1.	Pertama	Januari – Maret
2.	Kedua	April – Juni
3.	Ketiga	Juli – September
4.	Keempat	Oktober – Desember

(Sumber : Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah, 2021)

Mekanisme pengambilan / pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau telah sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang mana pengambilan/pencairan dana BOS harus dilakukan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS disertai buku rekening BOS, identitas diri serta voucher yang diterima dari Tim BOS Provinsi.

c) Keterlibatan *Stakeholders* Sekolah

Peran serta *stakeholders* sangat penting dalam perencanaan, penyusunan dan pelaporan dana BOS. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam setiap detail

penggunaan dana BOS. Keterlibatan *stakeholders* ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan dana BOS harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara disertai tanda tangan setiap peserta rapat.

Dari pernyataan Kepala Sekolah dan Tim Manajemen BOS, penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sebelumnya sudah dilakukannya sosialisasi kepada para Dewan Guru. Pihak sekolah mensosialisasikan terkait apa itu BOS, Kegunaan BOS, tujuan BOS, ketentuan yang perlu ditaati dalam penggunaan dana BOS dan sebagainya.

Namun pernyataan lain diungkapkan oleh Ketua Komite dan Dewa Guru, dana BOS yang dikelola oleh pihak sekolah tidak melibatkan *stakeholders* dalam perencanaan penggunaan anggaran tersebut. Dalam hal ini, orang tua siswa juga kurang memahami kegunaan dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah, hal ini terjadi karena kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa

Ketidakikutsertaan dewan guru dalam laporan perencanaan BOS menjadikan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau tidak efektif. Jika melihat pada ketentuan

penggunaan dana BOS dimana penggunaan dana BOS oleh sekolah harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah, Tim BOS, dewan guru dan komite sekolah, nampaknya yang terjadi agak menyimpang dari ketentuan yang ada. Pihak sekolah membuat laporan perencanaan pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan dewan guru dan komite sekolah, seperti yang kita tau komite sangat dibutuhkan dalam proses tersebut untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat serta sebagai pengawas internal dalam pengelolaan dana BOS.

Di SMA Negeri 1 Badau sendiri, kurangnya transparansi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Beban Kepala Sekolah, semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin banyak juga beban yang harus dipertanggung jawabkan sehingga menyulitkan Kepala Sekolah melibatkan *Stakeholders* dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS.
- 2) Pengelolaan Dana BOS Tidak Dilaksanakan Sesuai Prosedur, hasil wawancara menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS sudah berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, namun masih banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yang tidak mengikuti buku pedoman Petunjuk Penggunaan Dana BOS.
- 3) Pihak Sekolah Sengaja Tidak Mengunduh Aplikasi Dapodik Sehingga Tidak di Awasi

Langsung Oleh Pemerintah, Aplikasi Dapodik mulai dikembangkan pada tahun 2006 oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan mulai di oprasikan secara aktif pada tahun 2012. Pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Badau direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi mendapatkan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), yang artinya aplikasi dapodik sudah bisa dijalankan sejak saat itu. Namun pihak sekolah mengaku tidak mengetahui hal tersebut, padahal aplikasi dapodik sudah banyak tersebar di internet dan bukan hal asing di dunia pendidikan karena aplikasi dapodik ini sangat penting khususnya dalam pengelolaan Dana BOS dan diawasi langsung dari Pemerintah Pusat sehingga meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan yang utama ialah Komunikasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang mana dari tahun 2018-2021 penggunaan dana BOS dialokasikan kepada

kebutuhan Operasional non personalia sekolah. Komunikasi yang baik terjalin antara Kepala Sekolah dan Bendahara BOS serta Timnya dalam mengelola dana BOS sehingga alokasi penyaluran dana menjadi lebih baik dari tahun ketahun, hal ini dibuktikan dengan buku pelajaran yang diberikan pada peserta didikan mengalami pertambahan.

2) Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah ada beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM dalam mengelola Dana BOS, dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pengelolaan dana BOS hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS sehingga sekolah kesulitan dalam mengelola dana BOS tersebut. Seharusnya pihak sekolah melibatkan para guru dalam pengelolaan dana BOS tersebut, peran serta dewan guru dapat meringankan pengelolaan dana BOS yang selama ini hanya dilakukan berdua. Hal ini juga akan menjadikan proses perencanaan dan pengelolaan dana BOS menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS.
- b. Letak Geografis Sekolah, letak sekolah yang berada di perdesaan jauh dari kota menjadi salah satu

- pengehambatnya penyaluran dana BOS. Untuk sampai ke Provinsi, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS memakan waktu 8 jam selama perjalanan. Pentingnya penggunaan aplikasi Dapodikmen menjadikan penyaluran dana BOS lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama sehingga penyaluran dana BOS ke pihak sekolah bisa dilakukan tepat waktu.
- c. Penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, penyaluran dana BOS dilakukan serentak dengan semua sekolah di wilayah tertentu sehingga penyaluran masih harus menunggu kesiapan semua sekolah dalam menerima dana BOS. Hal ini sangat berpengaruh dikarenakan pihak sekolah harus mengelola dana BOS yang sebelumnya dengan sangat baik sehingga mencukupi dengan tanggal penerimaan dana BOS berikutnya.
- d. Dana BOS yang diterima dirasa belum mampu mencukupi semua kebutuhan sekolah, penyaluran dana BOS dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik dikalikan dengan hasil yang diberikan pemerintah. Pihak sekolah harus mengelola dana BOS dengan lebih efektif sehingga dana BOS yang disalurkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekolah mengaku telah berusaha mengelola dana BOS dengan baik sesuai buku Petunjuk Teknis
- Penggunaan Dana BOS namun terkadang terjadi hambatan dikarenakan situasi yang sebenarnya itu jauh lebih berbeda dari apa yang tertulis di Undang-Undang, kebutuhan setiap sekolahpun pasti berbeda-beda sehingga sangat sulit untuk sekolah menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan peraturan yang ada terutama dengan dana BOS yang terbatas.
- 3. Rekomendasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat**
- Rekomendasi Implementasi Kebijakan BOS di SMA Negeri 1 Badau diharapkan lebih Transparan dan Akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak manajemen BOS sekolah kepada dewan guru, komite dan orang tua peserta didik khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan di manfaatkan sebagai informasi keuangan. Akuntabel dalam manajemen keuangan sekolah berarti penggunaan dana BOS yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, dewan guru, komite dan orang tua peserta didik. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana BOS lebih efektif sehingga tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar serta meningkatkan mutu sekolah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Kebijakan Retrospektif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah pengimplementasian kebijakan pengelolaan dan BOS di SMA Negeri 1 Badau belum sepenuhnya efektif meskipun sudah berpedoman kepada Petunjuk Teknis Penggunaan BOS, karena:

- 1) Masih terdapat saran dan prasarana yang tidak didanai oleh BOS dan di bebankan kepada peserta didik serta masih kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga menghambat perkembangan peserta didik dalam proses belajar.
- 2) Mekanisme penyaluran dana BOS masih menggunakan cara manual sehingga memakan proses yang lama.
- 3) Kurang adanya transparansi dalam perencanaan, penyusunan dan pelaporan mengenai dana BOS kepada *stakeholders* sekolah sehingga jalannya pengelolaan dana BOS tidak dalam pengawasan.

Diatas merupakan kendala yang menjadikan kurang efektifnya pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Badau. Adapun faktor pendukung dan penghambat

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendukung
 - a. Komunikasi yang baik antara Tim BOS sekolah sehingga pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Badau berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
- 2) Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya SDM dalam mengelola dana BOS.
 - b. Letak Geografis Sekolah yang jauh dari Perkotaan.
 - c. Penyaluran dana BOS yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
 - d. Dana BOS yang diterima dirasa belum mampu mencukupi semua kebutuhan sekolah.

Sekolah mengaku telah berusaha mengelola dana BOS dengan baik sesuai Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS namun terkadang terjadi hambatan dikarenakan situasi yang sebenarnya itu jauh lebih berbeda dari apa yang tertulis pada Undang-Undang, sehingga sangat sulit untuk sekolah menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan peraturan yang ada terutama dengan dana BOS yang terbatas.

Komunikasi antara Kepala Sekolah, Tim BOS, Komite dan Dewan Guru menjadi sangat penting karena masalah seperti ini bisa terpecahkan dengan mencari solusi bersama-sama. Oleh karena itu banyak rekomendasi implementasi kebijakan BOS kedepannya ialah menerapkan prinsip Transparansi dan

Akuntabel yang mana tujuan dari rekomendasi ini ialah menjadikan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau lebih tepat sasaran sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS.

2. Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pengimplementasian Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Badau sudah berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS namun belum efektif. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

- 1) Sekolah seharusnya mengadakan sosialisasi kepada dewan guru, Komite sekolah serta orang tua peserta didik mengenai perencanaan/penggunaan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari para *stakeholders* sekolah, program BOS ini dapat berjalan secara optimal, transparansi dan akuntabel.
- 2) Diharapkan pihak sekolah lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sehingga proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Badau berjalan lebih efektif dan efisien.
- 3) Diharapkan pihak sekolah segera menggunakan Aplikasi Dapodik sehingga mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat

diawasi langsung oleh pemerintah.

REFERENSI

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Burhan, Bungil. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Hal. 6. Jakarta: Kencana
- Chairunnisa, Connie. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*. Hal. 177. Jakarta: mitra Wacana
- Duun, W. N. 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fattah, Nanang. 2014. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Hal. 177. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kemendiknas. 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015*. Jakarta : Dekdikbud

- Moleong, j. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah: Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Hal. 209. Jogjakarta: Ar-Ruzz Merdia
- Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020. *Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang *Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB*.
- Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Sagala, Syaiful. 2016. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2009. *Metode penelitian Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Hal. 308. Bandung Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 ayat 2 : Wajib Belajar*.

Internet :

- Dye, dan Lasswell, dan Lester. 2015. *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, dalam Eddy (2004) :* <https://www.kumpulanpengertian.com>, diakses 14 Desember 2021

- Data statistik. 2006. *Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat* : <https://kec-badau.kapuashulukab.go.id>, diakses 09 Desember 2021
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Logo Aplikasi Dapodik (versi 2022) :* <https://www.dapo.kemdikbud.go.id>, diakses 21 Februari 2022
- Oktifa, Nita. 2021. *Aplikasi Dapodik (versi 2022) :* <https://akupintar.id>, diakses 21 Februari 2022
- Selfanus, Stevan, A. 2021. *Faktor Penyebab pemerintah tidak transparan* : <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/142912769/faktor-penyebab-pemerintah-tidak-transparan>, diakses 21 Februari 2022

